

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi lokal, UMKM juga berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi output, mendorong pemerataan perekonomian, serta mengurangi tingkat pengangguran. UMKM dipandang sebagai sektor usaha yang tangguh karena mampu bertahan dan berkembang di berbagai kondisi ekonomi, termasuk pada masa-masa krisis. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan dari data kementerian koperasi dan UKM, bahwa UMKM menyumbangkan sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional atau setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk jumlahnya mencapai 65,5 juta unit usaha atau sekitar 99% dari semua total unit usaha yang ada. Berdasarkan Undang-Undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM itu merupakan salah satu bisnis yang dikerjakan ataupun dikelola oleh para pemilik atau pengelola usaha baik itu secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha yang berskala kecil.

Meskipun berkontribusi besar terhadap perekonomian, banyak pemilik atau pengelola UMKM masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha yang konsisten, sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal. Pemahaman yang mendalam ini akan membantu wirausahawan memahami nilai finansial, memberikan manfaat langsung, serta berdampak signifikan bagi masa depan dan kemajuan bisnis mereka (Purnamasari & Asmawati, 2024). Kemampuan pemilik atau pengelola usaha dalam menyusun laporan keuangan turut berpengaruh terhadap kinerjanya, karena laporan tersebut menjadi dasar untuk menilai kondisi usaha dan melakukan penyesuaian strategi bisnis yang diperlukan (Wahid, 2022).

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak UMKM adalah Kabupaten Kebumen, dengan struktur perekonomian yang sangat beragam. Berdasarkan pembaruan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, UMKM di Kebumen berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis usaha. Pemerintah Kabupaten Kebumen turut aktif mendorong perkembangan UMKM melalui berbagai upaya peningkatan jaringan keuangan usaha, sehingga pendapatan pelaku usaha dapat lebih meningkat. Di Kebumen, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap sekitar 123.290 tenaga kerja atau 70% dari total angkatan kerja daerah.

Berdasarkan data terkini dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten

Kebumen dalam dokumen Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022, tercatat sebanyak 46.390 unit UMKM yang tersebar di 26 kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel I-1

Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	1.973
2	Ambal'	1.113
3	Ayah	885
4	Buayan	39
5	Buluspesantren	3.381
6	Gombong	4.478
7	Karanganyar	767
8	Kebumen	7.612
9	Klirong	3.967
10	Kutowinangun	1.114
11	Kuwarasan	1.205
12	Mirit	1.169
13	Padureso	457
14	Petanahan	1.527
15	Poncowarno	1.041
16	Prembun	1.106
17	Puring	2.002
18	Rowokele	1.461
19	Sempor	1.505
20	Sruweng	1.791
21	Bonorowo	878
22	Pejagoan	857
23	Karangsambung	1.388
24	Alian	3.504
25	Sadang	667
26	Karanggayam	503
	TOTAL	46.390

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2022

Berdasarkan tabel I-I diatas, terlihat bahwa persebaran UMKM di Kabupaten Kebumen tidak merata antar kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Kebumen (7.612 unit), Gombong (4.478 unit), dan Klirong (3.967 unit), yang merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Sementara itu, kecamatan seperti Buayan (39 unit) dan Karanggayam (503 unit) mencatat jumlah UMKM yang jauh lebih sedikit, kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang lebih didominasi sektor pertanian dan letak geografis yang relatif terpencil. Persebaran yang tidak merata ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Kebumen masih sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan aksesibilitas wilayah.

Di antara berbagai sektor UMKM yang ada, sektor kuliner merupakan salah satu sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Kebumen, mulai dari warung makan, angkringan, kedai, hingga usaha katering rumahan. Sektor ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tren jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kuliner. Pemerintah daerah turut aktif memberikan pembinaan dan program pendukung, seperti bantuan rehabilitasi warung, guna meningkatkan kualitas UMKM kuliner di Kebumen.

Fenomena ini turut terlihat pada kondisi UMKM di Kabupaten Kebumen, di mana mayoritas pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya tanpa sistem pencatatan keuangan yang menyeluruh, bahkan banyak di

antaranya kesulitan mengintegrasikan sistem manajemen keuangan ke dalam operasional usahanya, sehingga pencatatan yang dilakukan cenderung asal-asalan dan tidak konsisten (Latifah, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Kebumen, termasuk pada sektor kuliner, masih belum menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan efisien, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi kinerja keuangan usaha itu sendiri.

Pengelolaan dana modal, pemasukan, dan pengeluaran sering kali dilakukan tanpa pencatatan yang rapi, sehingga menjadi salah satu hambatan umum yang dihadapi UMKM di Kebumen. Oleh karena itu, pemahaman yang mendasar terkait informasi keuangan sangat penting bagi pemilik atau pengelola UMKM (Gunawan et al., 2021). Usaha yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha itu sendiri (Ediraras, 2010).

Kinerja keuangan menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana suatu usaha mampu mencapai tujuan ekonominya sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka waktu tertentu. Karena kinerja yang baik berperan penting dalam meningkatkan nilai usaha, mendukung stabilitas, serta memastikan kelangsungan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif (Pramestiningrum & Iramani, 2020). Namun demikian, UMKM kerap menghadapi kendala seperti pencatatan keuangan yang masih manual, pengelolaan keuangan yang kurang maksimal, serta kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja

keuangan perlu didorong melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan terencana agar UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan (Sa'adah & Indahsari, 2022).

Akuntabilitas merupakan aspek kunci dalam pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mengacu pada kewajiban pemilik atau pengelola usaha untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara jujur dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik keluarga, mitra usaha, maupun lembaga keuangan. UMKM yang mampu menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan lebih mudah membangun kepercayaan pasar maupun lembaga keuangan ketika mengajukan pembiayaan atau kerja sama usaha (Widowati et al., 2023).

Selain akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi aspek krusial, yaitu keterbukaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. UMKM yang menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur cenderung lebih dipercaya oleh pemasok, kreditur, dan mitra usaha, sehingga lebih mudah dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

Di samping akuntabilitas dan transparansi, efisiensi pengelolaan keuangan turut menjadi kunci peningkatan kualitas UMKM. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan secara optimal, sehingga mampu meminimalkan pemborosan dan

memaksimalkan keuntungan. Efisiensi pengelolaan ini semakin penting bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia, terutama di tengah era digital saat ini, di mana teknologi informasi dan sistem pembayaran digital menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Peningkatan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lubis & Rofila, 2024). Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian negara mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM dengan cara diwajibkan untuk beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi yang ada, salah satunya penyediaan QRIS sebagai metode pembayaran digital.

Perkembangan teknologi digital beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar pada cara UMKM berinteraksi, terkhusus pada daerah Kabupaten Kebumen saat ini. Salah satu inovasi yang penting yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar pembayaran non-tunai berbasis *QR code*. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah merchant QRIS terus tumbuh pesat dan lebih dari 90% merchant QRIS adalah pelaku UMKM, yang menunjukkan antusiasme tinggi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengadopsi pembayaran non-tunai. Dengan QRIS ini, pemilik atau pengelola UMKM dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko terkait uang tunai (seperti kehilangan atau kesalahan penghitungan), serta mendukung pencatatan

transaksi yang lebih rapi dan terdokumentasi. Hal ini berpengaruh pada peningkatan volume penjualan, perputaran arus kas yang lebih cepat, dan kemudahan dalam memantau pendapatan harian.

Meskipun demikian, di Kebumen sendiri, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum mengadopsi metode pembayaran digital (QRIS) karena mereka menganggapnya kurang familiar dan khawatir metode pembayaran non-tunai justru mempersulit proses transaksi. Padahal, pembayaran nontunai menawarkan transaksi yang lebih aman serta pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan fleksibel. Tingkat adopsi pembayaran digital yang masih perlu ditingkatkan ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif agar pelaku UMKM lebih sigap dalam memasuki ekosistem digital.

Adanya perbedaan hasil (*research gap*) antar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan, dan penggunaan QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM masih bersifat kontekstual dan dapat berbeda tergantung pada karakteristik wilayah, sektor usaha, maupun skala UMKM yang diteliti. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menguji keempat variabel tersebut secara bersamaan pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menguji kembali konsistensi pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya pada konteks UMKM kuliner

di Kabupaten Kebumen yang memiliki karakteristik usaha dan kondisi ekonomi lokal tersendiri.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan laporan yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI PENGELOLAAN, DAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN QRIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KABUPATEN KEBUMEN.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan permasalahan yang ada pada UMKM di Kebumen, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen?
3. Apakah efisiensi pengelolaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen?
4. Apakah penggunaan pembayaran QRIS berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, diperlukan pembatas masalah untuk menghindari perluasan pembahasan. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah kuliner di Kabupaten Kebumen.
2. Responden penelitian adalah pemilik/pengelola UMKM kuliner di Kabupaten Kebumen, baik yang sudah maupun belum terdaftar secara resmi yang telah beroperasi minimal 1 tahun.
3. Variabel independen dibatasi pada empat variabel: akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan penggunaan pembayaran QRIS.
4. Variabel dependen dibatasi pada kinerja keuangan yang diukur secara persepsional oleh pemilik/pengelola UMKM, bukan berdasarkan laporan keuangan formal.
5. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pendekatan penelitian kuantitatif.
6. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain di luar keempat variabel tersebut yang mungkin turut memengaruhi kinerja keuangan UMKM.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah peneliti susun, maka peneliti juga merumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen.
2. Menilai pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen.
3. Mengetahui pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM.
4. Mengetahui pengaruh penggunaan pembayarana QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM.
5. Mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan, dan penggunaan pembayaran QRIS secara simultan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen.

1.5. Manfaat Penelitian

8.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya kajian mengenai akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan keuangan, dan adopsi teknologi pembayaran digital (QRIS) dalam konteks UMKM.
- b. Memperluas kajian terkait adopsi dalam perspektif kinerja keuangan.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis, khususnya pada level kabupaten/kota.

8.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan tambahan wawasan pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan, dan penggunaan pembayaran QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kebumen.

2. Bagi Pemilik/Pengelola

Memberikan gambaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan di sebuah UMKM. Serta menjadikannya bahan evaluasi juga terhadap akuntabilitas, transparansi, efisiensi pengelolaan, dan penggunaan pembayaran QRIS terhadap kinerja keuangan usaha.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi ataupun informasi bagi para pembaca yang lainnya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembandingan untuk penelitian dengan tema serupa di masa mendatang.